

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**TESIS**

**OLEH**

**THOMSON HUTASOIT  
NPM. 101803010**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas  
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

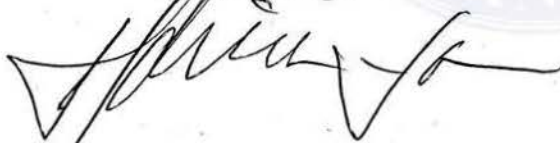
**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**NAMA : THOMSON HUTASOIT**  
**NPM : 101803010**  
**JUDUL : PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

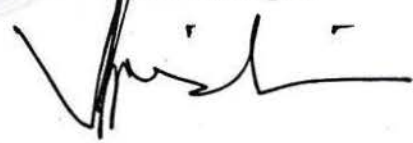
**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**DR. H. Surya Perdana, SH, M.Hum.**

**Pembimbing II**



**DR. Mirza Nasution, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**DR. Mirza Nasution, SH, M.Hum**

**Direktur**



**Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada tanggal : 10 Mei 2012**

---

**Nama : Thomson Hutasoit**  
**NPM : 101803010**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.**  
**Sekretaris : Muaz Zul, SH., M.Hum.**  
**Pembimbing I : Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum.**  
**Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.**  
**Penguji Tamu : Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum.**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Thomson Hutasoit**

NPM : **101803010**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

***“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan”*** adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.



Medan, 27 APRIL 2012



**Thomson Hutasoit)**

# **PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**Thomson Hutasoit \***

**Surya Perdana \*\***

**Mirza Nasution\*\*\***

## **ABSTRAK**

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah sangat penting guna memberikan pelayanan pemerintah yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat atau penduduk sebagai salah satu unsur negara dapat terlindungi. Pemerintah melalui aparatur birokrasi terus dituntut untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya maupun melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dengan demikian penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan administrasi kependudukan jelas akan memperbaiki dan menata lebih baik administrasi kependudukan yang benar dan akurat dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat khususnya tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang benar dan akurat, sehingga diharapkan seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memilikinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, menimbulkan suatu perumusan masalah yaitu: a) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam penerbitan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan ? b) Bagaimana kendala atau faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ? c) Bagaimana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat ?

Pada penelitian yang berlokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan ini, dilakukan analisis untuk mengetahui proses penerapan prinsip *good governance* kepada masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan dengan analisa data kualitatif berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.

---

- Mahasiswa PPs. MIH UMA

-- Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MIH UMA

--- Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MIH UMA

Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan telah dilaksanakan dengan aturan dimulai dari berkas yang harus dipenuhi, tata cara, sampai diterbitkan dan diterimanya dokumen oleh masyarakat, dan bagi pelanggar telah dikenai sanksi baik sanksi administratif berupa denda maupun sanksi pidana penjara. Kemudian masih terdapat kendala baik interen maupun eksteren yang mengakibatkan penataan administrasi kependudukan khususnya penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk belum maksimal sehingga masih banyak penduduk belum memilikinya. Dari 43.073 kepala keluarga, baru 16.187 atau 37,58 % kepala keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga. Sementara dari 117.043 orang wajib Kartu Tanda Penduduk, baru 61.468 atau 52,51 % yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Sedang pemberian sanksi administratif berupa denda bagi penduduk yang terlambat membuat KTP baru atau memperpanjang KTP tidak banyak berpengaruh kepada meningkatnya penduduk memiliki KK dan KTP, dimana dari Januari sampai 31 Maret 2012 pengurusan KK dan KTP yang didenda sebanyak 1.167 dari 1.172 atau sebesar 99,57 % dan yang tidak di denda hanya 5 dari 1.172 atau sebesar 0,43 %. Masih rendahnya penduduk memiliki KK dan KTP adalah karena KK dan KTP baru diurus apabila diperlukan (utility) berarti orangh mematuhi hukum adalah karena kegunaan daripada hukum tersebut, atau manusia menyadari kalau dia hendak pantas dan teratur maka diperlukan kaedah. Selanjutnya prinsip-prinsip *good governance* telah dilaksanakan walaupun masih perlu disempurnakan khususnya masih sering terjadi kekuranghati-hatian petugas pada dinas atau pemerintah, dan masih kurangnya pemberian informasi yang benar kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahui peraturan administrasi kependudukan khususnya penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Kata Kunci:

- Prinsip *good governance*
- Pengelolaan Administrasi Kependudukan
- Kepatuhan Hukum
- Penduduk

**APPLICATION PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN THE  
MANAGEMENT OF POPULATION IN DISTRICT ADMINISTRATION  
HUMBANG HASUNDUTAN**

Thomson Hutasoit \*

Surya Perdana \*\*

Mirza Nasution \*\*\*

**ABSTRACT**

Application of the principles of good governance in the management of population administration is very important to provide good government services to the community, so that the community or the population as one element of the country can be protected. Government through the bureaucratic apparatus continues to be required to continue to provide excellent service to the public pursuant to Act No. 23 of 2006 and other legislation as well as through policies that pro-people. Thus the application of the principles of good governance in the management of population administration clearly will improve and better organize administration that is true and accurate and increase awareness of and compliance with the legal community, especially about the importance of ownership Family Card of civil documents and identity cards are correct and accurate, so it is expected that all people living in the territory of the Republic of Indonesia may have it.

Based on the above background, leads to a formulation of the problem, namely: a) How does the implementation of Law No. 23 of 2006 in the household registration documents and the issuance of identity cards in the District Humbang Hasundutan? b) What constraints or limiting factors encountered in the Family Card issuance of civil documents and identity cards? c) How does the service of civil documents issuance of family card and identity cards made by local government Humbang Hasundutan to the public?

In the study, located in the Department of Population and Civil District Hasundutan Humbang this, an analysis to determine the application of the principles of good governance to the people in the administration population with qualitative data analysis based on data collected in the department of population and civil District Humbang Hasundutan.

---

\* A College Student of PPs. MIH UMA

\*\* First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MIH UMA

\*\*\* Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MIH UMA

From the survey results revealed that the process of publishing the Family Card and Resident Identity Card at the Department of Population and Civil District has undertaken Humbang Hasundutan with the rules of the beam begins to be met, procedures, up to and receipt of documents published by the society, and the offenders have been subject to sanctions both fines and administrative sanctions of imprisonment sanctions. Then there are both internal and eksteren constraints that resulted in the arrangement of the population administration, especially family card issuance and identity cards have not been up so many people still do not have it. Of the 43 073 households, 16 187 or 37.58% of new households that already have a family card. While 117 043 people of compulsory identity cards, the new 61 468 or 52.51%, which already have identity cards. Being the provision of administrative sanctions fines for people who are late making a new ID card or ID card does not have much effect extending to the increasing population has KK and ID card, which from January to March 31, 2012, KTP and KK arrangements are fined as much as 1.167 of 1.172 or by 99.57% and that is not in the fine only 5 of 1.172 or by 0.43%. The low population had KK and the ID Card is due to the new ID card administered if required (utility) means orangh comply with the law is because the usefulness of the law, or the man realized he wanted to appropriated and necessary basis then siwak. Furthermore the principles of good governance have been implemented, although still need to be refined still common particular attention to the officer or government agency, and is still a lack of provision of correct information to the public so that there are still many people do not know the population, especially the issuance of administrative regulations and the Family Card Card population.

The key word:

- The principle of good governance
- Management of Population Administration
- Legal Compliance
- Population



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area;
5. Bapak Dr. H, Surya Perdana, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak/ Ibu Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area;

7. Rekan-rekan seangkatan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas ketabahan, keikhlasan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis oleh isteri dan semua anak-anakku, semoga dapat dijadikan semangat untuk mengejar ilmu, karena untuk ilmu tidak kenal batas usia.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan saran, kritikan dan masukan guna menuju kearah kesempurnaan suatu karya tulis, sehingga nantinya penulisan ini dapat lebih mendekati kesempurnaan.

Akhir kata semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebajikan dengan berlipat ganda, sehingga harapan penulis karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembacanya.

Medan, April 2012  
Penulis,

**Thomson Hutasoit**  
NPM : 101803010

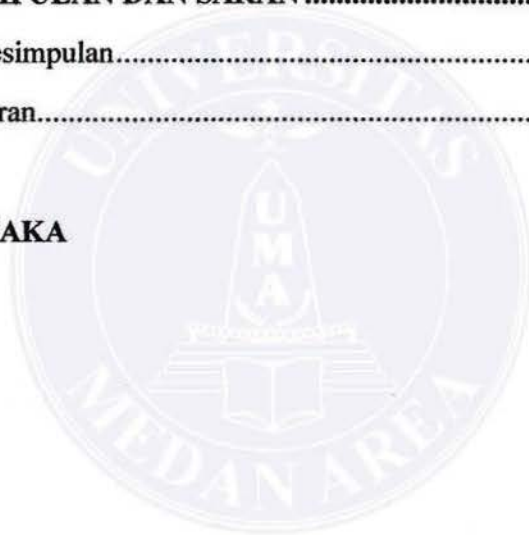
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis .....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
1.6.1. Kerangka Teori .....	8
1.6.2. Kerangka Konsep .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
2.1. Pengertian Dokumen Kartu Keluarga .....	25
2.2. Pengertian Dokumen Kartu Tanda Penduduk .....	30
2.3. Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduk Penerbitan KK dan KTP .....	33

2.3.1. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk .....	33
2.3.2. Tata Cara Penerbitan KK .....	37
2.3.3. Tata Cara Penerbitan KTP .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1. Spesifikasi Penelitian .....	45
3.2. Lokasi Penelitian.....	46
3.3. Populasi dan Subyek Penelitian.....	47
3.4. Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1. Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Penerbitan Dokumen KK dan KTP .....	50
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Humbang Hasundutan .....	50
4.1.2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.....	56
4.1.3. Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Penerbitan Dokumen KK dan KTP.....	58
4.1.3.1. Sanksi Administrasi.....	60
4.1.3.2 Sanksi Pidana .....	66
4.2. Kendala Yang Dihadapi dan Solusi Dalam Penerbitan Dokumen KK dan KTP .....	74
4.2.1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerbitan Dokumen KK dan KTP .....	74
4.2.1.1. Faktor Interen.....	75
4.2.1.2. Faktor Eksteren .....	81
4.2.2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerbitan Dokumen KK dan KTP.....	94

4.3. Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Penerbitan Dokumen KK dan KTP Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Kepada Masyarakat .....	103
4.3.1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.....	103
4.3.2. Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Penerbitan Dokumen KK dan KTP Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Kepada Masyarakat .....	106
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>126</b>
5.1. Kesimpulan.....	126
5.2. Saran.....	128

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1. Latar Belakang**

Negara menyelenggarakan pemerintahan pada hakikatnya menjaga kepentingan rakyat dengan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengayoman serta melayani sesuai kebutuhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya.

Kewajiban negara diatas sejalan dengan isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yang berbunyi : “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” .

Negara melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, dapat berupa memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif, serta disisi lain pada hakikatnya memberikan pengakuan terhadap penentuan status pribadi maupun status hukum atas segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang

bertempat tinggal di Indonesia, selanjutnya ayat (2) : hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Kewajiban negara untuk melindungi penduduk orang asing disamping Warga Negara Indonesia disebabkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari bermacam-macam warga negara dan semakin deras arus globalisasi yang melanda seluruh negara termasuk negara Indonesia.

Penegasan ini sebelumnya tidak termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, dimana perubahan ini dilatarbelakangi kebutuhan memasukkan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai unsur penduduk selain Warga Negara Indonesia . Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, akan berakibat hukum dimana orang asing sebagai penduduk Indonesia akan melekat hak dan kewajiban sesuai perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial) dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku secara umum (*general international law* ).<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lahirnya undang-undang ini menguatkan dasar hukum pengaturan administrasi kependudukan, dimana sebelumnya pengaturan administrasi kependudukan diatur

---

<sup>1</sup> Setjen MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta, 2009, halaman 110-111.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/ Makalah

Abdurahman, *Beberapa Apekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Biro Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011*

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana UMSU, Medan, 2010.

Fuady, Munir, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Husein, Yunus, *Makalah: Pentingnya Penegakan Good Governance dan Rezim Pencucian Uang untuk Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Medan, 16 Oktober 2011

Jauhari, Iman, *Sosiologi Hukum*, Cetakan I, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009.

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan III, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980

Kansil C.S.T, Christine S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung, 2011

Minin, Darwinsyah, *Penerapan Otonomi Daerah Reinventing Goverment dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, Cetakan I, CV. Prima Jaya, Medan, 2011.

Mustafa, Bachsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 4, Alumni, Bandung, 1985.



Nasution, Bismar, *Makalah: Peranan Birokrasi dalam Mengupayakan Good Governance, Suatu Kajian dari Pandangan Hukum dan Moral*, Medan, 16 Oktober 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan II, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Thania, Ira, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetaan X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Setjen MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD RI Tahun 1945*, Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan II, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi I, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan V, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Utrecht, E dan Saleh, Djindang, Moh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan XI, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1989.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesi No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penggantian Biaya Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Tanggal 09 Pebruari 2011, No. 390/Pid.B/2010/PN.TRT

